



**P U T U S A N**

**Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Karyawan, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.LK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Mei 2005 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor DN/037/IX/2010, dikeluarkan oleh PPN/KUA Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 21 September 2010;

*hal. 1 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 minggu, kemudian pindah ke Rengat selama 7 bulan dan setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 6 tahun 10 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 10 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada bulan Januari tahun 2006 disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang bermesra-mesraan dengan anak kakak Penggugat yang bernama **F**, sehingga hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan anak kakak Penggugat yang bernama **F** tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Tiakar;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, namun pada awal bulan Mei tahun 2006, Penggugat mendapatkan panggilan dari Polsek Danguang-Danguang sebagai saksi karena Tergugat dilaporkan orang tua **F** telah melakukan pencabulan terhadap anak mereka;
8. Bahwa setelah menjalani proses penyidikan dan persidangan, akhirnya Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan dihukum 4 tahun penjara, namun pada tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari penjara dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
9. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 402/148/WN.GG/2013, tanggal 21 Februari 2013;



10. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 20 Maret 2006, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan;

11. Bahwa dari uraian di atas Penggugat menyimpulkan, Penggugat telah merasakan suasana hidup yang tidak ada keharmonisan dan rukun bersama Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota melalui pengumuman Radio Harau FM sebanyak 2 kali, sesuai *relaas* panggilan Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 27 Februari 2013, tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*hal. 3 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK*



Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## **1. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN/037/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

## **2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ia kecil, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 6 Mei 2005 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya lebih kurang 10 bulan, setelah itu dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan anak kakak Penggugat yang bernama F;



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, selain itu akibat perbuatan Tergugat dengan F tersebut, Tergugat dilaporkan oleh orang tua F ke kepolisian dan dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga Tergugat dihukum selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Suliki;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut karena pada tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut dan sampai saat ini Tergugat belum berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak kejadian pencabulan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama lebih dari 6 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilaksanakan;

2.1. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ia kecil, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 6 Mei 2005 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;

hal. 5 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya lebih kurang 10 bulan, setelah itu dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan anak kakak Penggugat yang bernama F;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan F tersebut, Tergugat dilaporkan oleh orang tua F ke kepolisian dan dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga Tergugat dihukum selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Suliki;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut karena pada tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut dan sampai saat ini Tergugat belum berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak kejadian pencabulan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama lebih dari 6 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*

*hal. 7 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK*



*reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ الْإِنْفَ إِكْرَامٍ مَوْحِنٌ كُلُّ مُمِيسِدٍ لِمَا يَرْوَاهُ يُجِبُ  
وَهُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada bulan Januari 2006 Penggugat melihat Tergugat sedang bernesra-mesraan dengan anak kakak Penggugat yang bernama F, kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan anak kakak Penggugat yang bernama F tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Tiakar, selanjutnya pada awal bulan Mei 2006, Penggugat mendapatkan panggilan dari Polsek Danguang-Danguang sebagai saksi karena Tergugat dilaporkan oleh orang tua F telah melakukan pencabulan terhadap anak mereka, akhirnya Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan dihukum 4 tahun penjara, namun pada tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari penjara dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak tanggal 20 Maret 2006, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah dan telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai

hal. 9 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK



hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan anak kakak Penggugat yang bernama F sehingga Tergugat dilaporkan oleh orang tua F ke kepolisian dan dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga Tergugat dihukum selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Suliki, dan saat ini Tergugat sudah tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut karena pada tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Suliki tersebut, sampai saat ini Tergugat belum berhasil ditangkap kembali dan tidak diketahui keberadaannya,



selanjutnya sejak kejadian pencabulan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama lebih dari 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dapat dikategorikan terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan anak kakak Penggugat yang bernama F sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 tahun;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi karena sejak tahun 2008 Tergugat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Suliki dan sampai saat ini Tergugat belum berhasil ditangkap kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun lebih, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

*hal. 11 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK*



yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا  
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan



Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه (غاية المرام)**

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

hal. 13 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 25 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada Kamis, tanggal 4 Juli 2013 M bertepatan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Syakban 1434 H, dalam sidang terbuka untuk umum, serta **FAIZAL ROZA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**Ttd.**

**AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**FAIZAL ROZA, SH**

Rincian biaya perkara:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	316.000,-

hal. 15 dari 14 hal. Perkara No. 73/Pdt.G/2013/PA.LK



Untuk salinan yang sama bunyinya

**PANITERA**

**MASDI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)